

PROYEK IDENTITAS KULTUR KERUKUNAN
Studi Harmoni Kehidupan Warga NU, Muhammadiyah dan LDII

Mohammad Isfironi¹

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
DPK IAI Ibrahimy Situbondo
moh.isfironi@gmail.com

Abstract

The issue raised in this paper is about the fenomena of harmony both NU, MD and LDII communities di Awar-Awar Village Asembagus Situbondo Regency. By used ethnography approach founded that harmony constructed in a social manner by NU, MD and LDII communities and elites of Awar-awar village in every day life. Social construction consists of three moments that is externalization of religious understanding social institution, objectivation through interaction both people by social institution, and internalization is self identification by socialization. In a social manner, because of it pathernalistic character made elites construction influence to people construction. In a social manner, "*pendalungan*" (*Hybrid culture between Java and Madura ethnic*) characteristic also give cultural frame to creating harmony. The harmony condition influence all live aspects of people either in a social manner or economy and culture.

Keywords: *Harmony, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*

Pendahuluan

Realitas sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada akhir – akhir ini telah banyak mendapat perhatian, sorotan, dan keprihatinan dari berbagai kalangan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, pengamat, dari politisi, baik nasional maupun internasional. Sejak tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami liberalisasi politik dengan skala yang belum pernah dialami sebelumnya. Reformasi telah memunculkan keberanian dari

¹ Dosen untuk Mata Kuliah Teori-teori Sosial, Islam & Budaya Lokal dan Metodologi Penelitian Sosial dan Keagamaan di Fakultas Dakwah & Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy

setiap warga Negara untuk menyampaikan aspirasi, kepercayaan, agama dan identitasnya secara bebas tanpa tekanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa yang lalu, semua itu harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan pembangunan. Perbedaan pendapat adalah tabu, menonjolkan kesukaan dianggap mengancam identitas nasional, keyakinan dan agama yang sah adalah yang telah tercantum dalam undang-undang. Sesudah bergulirnya reformasi sejak tahun 1998, dinamika politik di daerah memasuki babak baru. Aktor, institusi dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal dengan pola-pola yang berbeda dari sebelumnya.²

Dalam skala yang lebih luas, globalisasi dunia telah menjadi suatu kekuatan besar yang membutuhkan respon yang tepat karena ia memaksa suatu strategi bertahan hidup (*survival strategy*) dan strategi pengumpulan kekayaan (*accumulative strategy*) bagi berbagai kelompok dan masyarakat.³ Pasar menjadi dominan dan memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas batas-batas sosial budaya. Pasar juga mengaburkan batas-batas itu akibat berubahnya orientasi ruang dalam masyarakat.⁴ Dengan kemajuan teknologi informasi, dunia telah terintegrasi dengan tatanan global, sehingga batas-batas antara Indonesia, Belanda, Brazil, Italia mencair akibat arus orang, barang, orang, informasi, ide-ide dan nilai yang semakin lancar, padat dan intensif. Kondisi di atas pada akhirnya mempengaruhi seluruh segi kehidupan masyarakat, politik, sosial, budaya, dan agama. Dalam kehidupan beragama, hubungan individu dan agama tak ubahnya menjadi semacam hubungan nasabah dan bank yang sewaktu-waktu bisa mengalami *rush*. Lantas keberagamaan menjadi kering kerontang, sekedar verbalisme yang hanya menekankan ritual-ritual yang tidak setangkup dengan kesadaran pencerahan diri.

Sementara itu, kecenderungan dan citra masyarakat Indonesia yang religius berkebalikan dengan kenyataan di lapangan. Setelah kran demokrasi terbuka, justru menunjukkan parasnya yang keras, kaku dan cenderung bru-

² Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*. (Jakarta: Obor, 2007).

³ Mike Featherstone, *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity* (London: SAGE Publications, 1990).

⁴ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

tal terhadap kelompok lain yang dipandang tidak se-*aqidah*, baik itu antar umat beragama maupun intern umat beragama. Serentak, ilmuwan, agamawan bahkan politisi menanggapi, bahwa ada masalah dengan pemahaman agama kita. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian kepada sesama manusia siapapun orangnya dan agamanya, demikian mereka umumnya berfatwa. Ironinya fatwa-fatwa agama bukan mendorong perilaku yang toleran, justru sebaliknya nampak ada hubungan yang kuat antara fatwa dan tindakan yang intoleran.⁵ Respon masyarakat terhadap Jama'ah Ahmadiyah, Jama'ah Lia Eden, LDII dan kelompok-kelompok lain yang dianggap sesat cukup mencemaskan, dan fatwa sesat justru mendorong eskalasi kekerasan. Kekerasan ini juga menunjukkan bahwa Negara dan pemerintah yang seharusnya menjamin perlindungan atas hak setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan keyakinan agamanya tersebut belum melakukan tugasnya dengan baik.

Tentu, upaya untuk memperbaiki kehidupan keagamaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat/umat beragama. Sangat disayangkan, respon terhadap persoalan keagamaan lebih banyak dalam tataran hubungan antar agama, sementara hubungan intern umat beragama⁶ yang memiliki persoalan yang cukup pelik kurang dicarikan jalan keluarnya. Ajaran *fastabiqu al-khairat* (berlomba dalam kebaikan), nampak hanya sekedar slogan yang lebih kentara sebagai persaingan politik antar agama dan antar ormas agama ketimbang sebagai sebuah ekspresi kerukunan sejati.

Peristiwa-peristiwa kerusuhan dan kekerasan yang bernuansa agama tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang konfliktual, fakta sejarah lebih menunjukkan bagaimana kerukunan lebih dominan dalam menjalin hubungan

⁵ Luthfi Assyaukani, "Fatwa and Violence in Indonesia". *Journal of Religion and Society* (Volume 11. 1999).

⁶ "Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masalah kerukunan beragama, masalah ini memiliki dua dimensi yaitu kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama antara lain diusik oleh lahirnya gerakan-gerakan sempalan yang sesat, menyimpang, dan juga sempalan yang tidak sesat tetapi tidak lazim dalam kehidupan berbangsa Indonesia." Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar dalam sambutannya pada diskusi buku *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* bertempat di Komplek TMII Jakarta, Selasa (09/02/2010).

antar agama dan intern umat beragama. Di beberapa tempat di Indonesia desa maupun kota masih banyak yang menunjukkan betapa masyarakatnya sangat rukun dan toleran, harmoni masih menjadi landasan sosial masyarakat. Konflik di daerah lain seperti: Poso (mulai 1998), Ambon (mulai 1998), Maluku Utara (2000), juga di Situbondo (1996) seyogyanya dilihat dalam konteks karena masyarakat tidak normal akibat timbunan permasalahan sosial sebagai akibat salah urus dari penguasa, sehingga harmoni yang menjadi kecenderungan masyarakat terkoyak.

Kerusuhan yang pernah terjadi di Situbondo pada tahun 1996 yang menghancurkan beberapa gereja yang tersebar di seluruh kawasan Kabupaten Situbondo bukanlah merupakan kerusuhan agama. Intrik dan rekayasa politik yang menjadi pemicu kerusuhan tersebut jauh lebih mungkin menjadi penyebab karena Situbondo merupakan basis pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga secara tradisional warganya adalah Nahdliyin.⁷ Karena itu di Desa Awar-Awar yang bertradisi pendalungan yang walaupun temperamental, namun juga memiliki basis budaya harmoni yang dipengaruhi etnik Jawa. Namun, oleh karena harmoni bukanlah sesuatu yang bersifat *given* (terberi), maka menelaah bagaimana proses pengkonstruksian harmoni di masyarakat dan bagaimana pula mereka mempetahkannya menjadi penting untuk diteliti.

Artikel ini disusun berdasar hasil studi penulis realitas kearifan masyarakat dalam mempraktikkan kerukunan intern umat beragama, antara warga Nahdlatul Ulama⁸ (baca: NU), Muhammadiyah⁹ (baca:MD) dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (baca: LDII)¹⁰ di Desa Awar-awar Asemba-

⁷ Choirul Anam, dkk. *Fakta dan Kesaksian Tragedi Situbondo* (Jatim: Tim Pencari Fakta GP Anshor Jatim, 1996).

⁸ Nahdlatul Ulama di sini adalah nama sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki anggota terbesar di Indonesia yang memiliki orientasi pemahaman keagamaan yang sebut oleh pakar sebagai kelompok Islam tradisional. NU didirikan oleh KHM. Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Tebuireng jombang pada tahun 1926 dengan tujuan mempertahankan Islam ala Ahlussunnah wal al Jama'ah.

⁹ Muhammadiyah adalah nama organisasi sosial keagamaan yang memiliki anggota terbesar kedua di Indonesia didirikan oleh KH.Akhmad Dahlan tahun 1912 di Yogyakarta dengan tujuan melakukan upaya pemurnian Islam atau disebut sebagai gerakan Islam Puritan.

¹⁰ LDII yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

gus Kabupaten Situbondo. Studi ini memiliki pretensi untuk memberikan gambaran bahwa kebudayaan memiliki andil yang sangat besar sebagai basis penciptaan kehidupan bermasyarakat terutama dalam konteks pluralitas seperti di Indonesia.

Pilihan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan etnografi untuk mengungkap fenomena harmoni diantara warga NU, Muhammadiyah dan LDII di Desa Awar-awar. Dengan pendekatan etnografi penulis ingin memahami secara lebih mendetil bagaimana individu dalam masyarakat di lokasi penelitian membentuk sebuah harmoni sementara mereka memiliki keyakinan yang berbeda dalam menjalankan agama (Islam) nya. Dengan studi ini diharapkan memiliki dua kegunaan, yaitu: *pertama*, dalam memberikan informasi kualitatif mengenai aspek-aspek hubungan intern umat beragama, sehingga kebijakan keagamaan yang diambil dapat lebih mengukuhkan harmoni bukan merusaknya. *Kedua*, dari segi kemasyarakatan dapat memberikan informasi baru atau mungkin istilah baru yang memperkaya penelitian empiris yang pernah dilakukan terutama tentang hubungan intern umat beragama dalam hal ini adalah intern Agama Islam.

Secara etimologi kata “harmonis” mempunyai makna keselarasan (Waspodo, 2001: 38). Sekurang-kurangnya ada enam ciri masyarakat harmonis itu secara sosiologis yaitu; *Pertama*, harmoni memiliki ciri *ekualitas* dan *uniformitas*. *Kedua*, harmoni juga mencirikan adanya tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, harmoni juga harus dilihat dari sisi keterbukaan. *Keempat*, yaitu keadilan. *Kelima*, harmoni selalu mencerminkan kebebasan (Waspodo, 2001: 40-41).

Dalam budaya Jawa, harmoni dimakna sebagai kondisi hidup yang se-rasi dan selaras dalam hubungan interaksinya. Hidup rukun adalah suatu keharusan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan ketenteraman

yang Cikal bakalnya didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI). Pada musyawarah besar [MUBES] YAKARI tahun 1981, nama YAKARI diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam [LEMKARI]. Pada musyawarah besar [MUBES] LEMKARI tahun 1990, sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri [Mendagri] waktu itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim Lembaga Karate-Do Indonesia, diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

dan kedamaian satu sama lain. Harmoni juga berarti harus bisa mengatasi perbedaan-perbedaan, bisa bekerja sama dan saling menerima untuk mencapai tujuan hidup. Rukun berarti mengatasi perbedaan, bekerja sama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis.¹¹ Kerukunan merupakan cermin adalah hubungan timbal balik yang ditandai sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling memaknai bersama-sama.

Secara sosiologis, harmoni telah menjadi ciri khas kehidupan di desa. Segala keputusan yang diambil selalu mengacu kepada harmoni. Hal ini terlihat dari institusi musyawarah seperti “rembuk desa” yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat desa. Institusi rembuk desa ini juga diperkuat dengan ritual-ritual yang mengokohkan sifat komunal masyarakat desa. Upacara merti desa, selamatan desa yang ada merupakan manifestasi sekaligus bukti orientasi harmoni, karena selamatan merupakan ritual yang memiliki tujuan untuk mempertahankan harmoni tersebut. (Beatty, 1999; Isfironi 2009) Dan dalam konteks hubungan agama-agama, Indonesia merupakan contoh baik dari isu-isu tentang agama, tantangan dan harapan terhadap terciptanya harmoni di dalam kehidupan beragama yang beraneka (Suseno: 2005, 9).

Untuk mengkaji fenomena kerukunan antara warga NU, Muhammadiyah dan LDII di Desa Awar-awar ini digunakan perspektif reori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Berger dan Luckman memahami masyarakat sebagai sebuah konstruksi kultural atau simbolik. Masyarakat itu bukanlah sebuah sistem, sebuah mekanisme, maupun sebuah pola organis; ia merupakan sebuah konstruksi simbolik atau sebuah kecerdasan kesadaran dalam menyusun ide-ide, makna-makna, dan bahasa. Sehingga sangat mungkin perbedaan-perbedaan yang muncul diantara ketiga ormas NU, MD dan LDII bukan merupakan perbedaan yang substansial namun soal orientasi, aksentuasi atau pendekatan. Dan karenanya mereka lebih cenderung mengkonstruksi relasi-relasi sebagai sebuah *tension with intimacy* atau harmoni.

¹¹ Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari orang Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1984), 82.

Harmoni di Awar-Awar : Sebuah Proyek Identitas Kultur Baru

Tradisi harmoni di kalangan masyarakat Desa Awar-Awar harus dipandang dalam perspektif proyek identitas dari Castell.¹² Harmoni di desa Awar-awar sebagai sebuah proyek merupakan suatu identitas kultur baru yang dikonstruksi oleh dua etnik dominan yaitu Madura dan Jawa yang tidak lagi terkungkung pada budaya etnik tertentu tetapi sangat dipengaruhi oleh besarnya komunitas yang dominan di suatu wilayah sosialisasi budaya. Orang-orang etnik Madura yang sebagian besar berbudaya santri, keras, ekspresif dan bersifat paternalistik, berhasil mewarnai perilaku masyarakat di wilayah *pendalungan* ini. Masyarakat Jawa yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat Madura berhasil mewarnai budaya komunikasi.

Identitas kultur khas pendalungan ini merupakan kompromi dua kultur dominan yang telah bertahun-tahun membangun suatu bentuk pencampuran yang bercitra multikultur. Proses reproduksi kebudayaan secara aktif sangat mungkin terjadi di kawasan ini. Melalui proses ini berbagai kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda mengharuskan adanya adaptasi. Menurut Abdullah,¹³ proses budaya semacam ini penting untuk dilakukan karena alasan-alasan, *pertama*: pada tataran sosial akan terlihat proses dominasi dan subordinasi budaya terjadi secara dinamis yang memungkinkan kita menjelaskan dinamika kebudayaan secara mendalam. *Kedua*, pada tataran individu akan dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi identitas kultural sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya tertentu.

Apa yang terjadi di Desa Awar-awar menampakkan sebuah fenomena munculnya identitas baru yang relatif unik yang disebut *pendalungan* itu. Di Desa Awar-awar sebagai kawasan *melting pot*, tradisi dan identitas masing-masing suku berhubungan secara dialektis dimana setiap kultur membawa dan berusaha mempertahankan tradisinya masing-masing. Untuk mempertahankan kultur masing-masing terjadi suatu proses sosialisasi ke dalam komunitasnya masing-masing. Melalui sosialisasi ini terjadi proses internalisasi nilai-nilai kehidupan sosial budaya masing-masing masyarakat. Oleh karena proses sosialisasi ini terjadi di kawasan budaya *melting pot*, bukan di wilayah

¹² Manuel Castell, *The Power of Identity* (Malden: Blackwell Publishing, 2004).

¹³ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 41-42.

kultur asalnya yaitu Jawa dan Madura, maka akan terjadi semacam intrusi kultural yang sedikit banyak akan menggerus kemapanan struktur kognitifnya.

Dalam proses interaksi kultural tersebut masing-masing kelompok menyadari baik cepat atau lambat mereka akan mengalami proses perubahan, namun masing-masing memperoleh kepuasan dengan mengembangkan konsepsi pemikiran dengan cara bertahan pada ideologi tradisionalnya masing-masing. Artinya dalam proses intrusi kultural dari kedua belah pihak terjadi upaya saling bertahan. Pada momentum seperti ini memungkinkan timbulnya resistensi sosial akibat dipicu oleh pilihan tindakan untuk mempertahankan struktur kognitif yang mengalami disonansi mekanisme perubahan cultural yang menyentuh kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Dalam proses sosialisasi tersebut masing-masing memiliki kecenderungan memperkokoh konstruksi identitas kultural pada lokalitasnya masing-masing.

Masyarakat Madura yang cenderung memiliki kekerabatan yang kuat, untuk mempertahankan identitas kulturalnya mereka cenderung mempertahankan pola tinggal kelompok dalam pola *taniyan lanjeng* (halaman rumah yang bersambung di depan deretan rumah) walaupun tidak sama persis. Dengan cara ini mereka tetap dapat mempertahankan diri dari berbagai hal termasuk keamanan lingkungannya. Sebagaimana para pendahulunya, mereka juga merupakan para pekerja keras dan ulet. Bagi mereka “Hidup itu harus bekerja, memahami cara kerja dan menghargai kerja orang” (Yuswandi, 2008: 58).

Di sisi lain, masyarakat Jawa juga masih cenderung mempertahankan kultur Jawa dengan memegang teguh harmoni, yakni kondisi hidup yang se-rasi dan selaras dalam hubungan interaksinya. Hidup rukun adalah suatu keharusan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan ketenteraman dan kedamaian satu sama lain. Harmoni juga berarti harus bisa mengatasi perbedaan-perbedaan, bisa bekerja sama dan saling menerima untuk mencapai tujuan hidup. Bagi orang Jawa, menjadi “Jawa” berarti harus menjadi manusia yang beradab, memahami bagaimana seharusnya bertingkah laku yang baik. Hidup yang benar adalah hidup sebagai orang Jawa, memperlihatkan tingkah laku yang halus, sopan, sabar, berkata-kata yang pantas dan mempertahankan tatanan yang teratur.

Masyarakat dengan dua budaya tersebut di wilayah pertemuan (*melting pot*) saling berinteraksi, berkomunikasi dan mengkonstruksi sistemnya sendiri. Dalam proses interaksi tersebut terjadi dialog untuk membangun makna-makna yang dipertentangkan, dipadukan atau saling dipertukarkan posisinya. Proses inilah yang disebut sebagai “atribusi makna-makna” atau “hibridisasi”. Hasil dari proses saling tukar menukar nilai dan pandangan hidup ini yang menghasilkan budaya baru yaitu yang disebut “pendalungan”.

Secara umum budaya baru yang menjadi ciri-ciri warga di wilayah Pendalungan termasuk di dalamnya warga Desa Awar-Awar dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, masyarakatnya cenderung bersifat terbuka dan mudah beradaptasi. *Kedua*, sebagian besar bersifat ekspresif, cenderung keras, temperamental, transparan dan tidak suka berbasa-basi. *Ketiga*, cenderung paternalistik sehingga keputusan bertindak mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh yang dijadikan panutan seperti Kiai atau yang dianggap sepuh atau dituakan. *Keempat*, menjunjung tinggi hubungan primer, memiliki ikatan kekerabatan yang relatif kuat, sehingga penyelesaian persoalan seringkali dilakukan secara beramai-ramai (*keroyokan*). *Kelima*, sebagian besar masih terkungkuh oleh tradisi lisan tahap pertama (*primary orality*) yang memiliki ciri-ciri suka mengobrol, ngrasani (membicarakan aib orang lain), dan bersolidaritas mekanis (takut menyimpang dari pikiran dan pendapat yang berlaku umum). *Keenam*, sebagian besar agraris tradisional, berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri, tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya.¹⁴ Dalam konteks budaya pendalungan inilah, tradisi harmoni dikonstruksikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Awar-Awar Kecamatan Asembagus Situbondo. Dalam perspektif Castells, harmoni adalah sebuah proyek identitas yang terus berproses di dalam kerangka kultur baru dengan kultur dominan Madura dan Jawa. Oleh karena sebuah budaya yang sedang berproses dan mencari bentuk, maka harmoni dalam hal ini cenderung bersifat rapuh dan selalu mengalami penyesuaian. Kalau, harmoni bersifat rapuh, faktor-faktor apa saja sesungguhnya yang turut membangun konstruksi harmoni di

¹⁴ Ayu Sutarto, “Sekilas tentang Masyarakat Pendalungan” *Makalah Pembekalan Jelajah Budaya 2006*, diselenggarakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tanggal 7-10 Agustus 2006.

Awar-Awar ?

Harmoni: Diantara Ajaran Agama dan Budaya

Seturut dengan pendapat Tim Pengkajian Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya harmoni diantara warga di Desa Awar-awar antara lain: *pertama*, adanya pola hidup kekerabatan; *kedua*, adanya kelompok umat akar rumput/paguyuban; *ketiga*, adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat; *keempat*, nilai-nilai luhur yang dihayati oleh masyarakat; *kelima*, adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan keenam adanya tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh (Muchtar, 2003: 225).

Namun untuk kepentingan laporan penelitian ini, penulis diskripsikan berdasarkan pembagian tegas yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. *Pertama*, faktor ekonomi. Yang dimaksud faktor ekonomi di sini setara dengan pengertian sosiologi ekonomi, yaitu hubungan antara masyarakat yang di dalam terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Sebagaiman dijelaskan dalam bab kedua, bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Awar-Awar adalah bertani dan beternak serta sebagiannya lagi berprofesi sebagai pedagang. Interaksi yang berlangsung di bidang ekonomi ini berlangsung proses mempelajari nilai, norma, peran dan semua persyarakat lainnya yang lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif di masyarakat.

Tipologi agraris masyarakat Desa Awar-awar menjadikan kemungkinan sosialisasi berjalan secara efektif, walaupun tidak sempurna. Sebagaimana lazim dalam masyarakat agraris, posisi dan peran di masyarakat penguasaan lahan pertanian sangat menentukan. Perbedaan kepemilikan lahan inilah yang menjadi kriteria stratifikasi sosial secara ekonomi. Pola hubungan kerja yang mereka bangun rasional, tidak nampak adanya diskriminasi atau membedakan berdasarkan golongan, faham keagamaan tertentu. Pola ini pula yang dijalankan oleh keluarga H.Isnain yang cukup dikenal sebagai petani tebu yang memiliki lahan yang cukup luas. Beberapa areal tanahnya dikerjakan oleh para petani penggarap yang notabena tetangga dengan memberika ongkos kerja tertentu yang disepakati. Sejauh ini hubungan kerja dibangun berdasarkan azas manfaat dan saling menguntungkan, jauh dari kesan eksploitatif.

Pola-pola hubungan kerja yang demikian nampaknya yang mendorong proses sosialisasi nilai-nilai Islam yang menjadi kecenderungan warga, terutama prinsip-prinsip mu'amalat yang adil. Dengan pola hubungan kerja yang demikian terjadi proses internalisasi nilai-nilai agama dan pemahaman keagamaan yang tereksternalisasi dalam ormas keagamaan.

Kedua, faktor sosial-budaya. Untuk menjelaskan faktor sosial-budaya yang mendorong terciptanya harmoni perlu dijelaskan hubungan agama dan budaya. Seturut dengan apa yang dilukiskan Geertz, pemahaman keagamaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana memandang apa itu agama dalam manifestasi empirisnya. Geertz melihat agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Kebudayaan tidak didefinisikan sebagai pola kelakuan, tetapi pola bagi (*model for*) kelakuan, yaitu yang terdiri atas serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana, dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya.

Di dalam buku ini Geertz mencefinisikan agama sebagai:

(1) sebuah sistem-sistem simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistik.¹⁵

Clifford Geertz memperkenalkan suatu perspektif baru di bidang antropologi untuk melengkapi perspektif sebelumnya. Dibandingkan dengan gurunya Turner yang lebih mengarah kepada antropologi sosial, maka Geertz lebih masuk ke dalam dunia budaya atau kajian antropologi budaya terutama kajian hubungan antara agama dan budaya yang telah menghasilkan karya-karya misalnya *The Religion of Java*,¹⁶ *Islam Observed* dan juga *Religion as a Cultural*. Bahkan *The Religion of Java* dianggap sebagai karya besar yang kemudian menjadi inspirasi banyak antropolog yang berminat pada kajian hubungan agama dan budaya. Walaupun dianggap banyak cacat dalam asu-

¹⁵ Baca: Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5

¹⁶ Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.

si-asumsi teorinya oleh para pengkritiknya, tidak dapat dipungkiri karya ini justru melegenda. Agak sulit mencari karya tentang hubungan agama dan budaya yang tidak memulai dari membahas buku ini.

Perspektif simbolik merupakan kelanjutan tidak langsung dari perspektif fenomenologi-interpretatif di dalam kajian agama yang memiliki kesamaan, yaitu ingin memahami apa yang ada di balik fenomena. Ia tidak hanya berhenti pada fenomena saja, namun terus bergerak menatap lebih mendalam dunia noumena yang sering dikonsepsikan sebagai pemahaman interpretatif.

Kebudayaan dalam perspektif simbolik dimengerti sebagai keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut.

Geertz memberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif serta sistem makna merupakan representasi pola dari atau *model of*, sedangkan sistem nilai adalah representasi kenyataan -- sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka "pola bagi" ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu. Contohnya adalah upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan "pola dari", sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara keagamaan adalah "pola bagi" atau model untuk.

Timbul pertanyaan bagaimana menghubungkan *pola dari* dan *pola bagi* dari sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan atau kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif dan simbol yang memungkinkan pemaknaan atau interpretasi. Adapun titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol ialah yang dinamakan makna (*system of meaning*). Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.

Dengan perspektif Geertz diatas, posisi budaya *pendalungan* yang menjadi karakteristik masyarakat Desa Awar-Awar sebagai “pola dari”, sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan kegiatan keagamaan adalah “pola bagi”. Karakteristik *pendalungan* yang terbuka, ekspresif, memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, serta memiliki solidaritas mekanik merupakan “pola dari” perilaku harmoni. Sedangkan keyakinan-keyakinan yang berasal dari ajaran-ajaran agamanya merupakan “pola bagi” perilaku harmoni. Dengan demikian harmoni diantara warga NU, MD dan LDII di Desa Awar-awar dapat dimengerti merupakan hasil konstruksi warga di dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan hubungan agama dan budaya sebagai wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari dan representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu.

Ketiga, faktor politik. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dapat dianalisis, pada masa lalu faktor politik justru menjadi faktor yang melemahkan harmoni. Di era orde baru terjadi fragmentasi di masyarakat berdasarkan afiliasi politik. Elit Muhammadiyah yang kebanyakan Pegawai Negeri sipil cenderung mengarahkan warganya untuk memilih Golkar. Sebaliknya Warga Nahdlatul Ulama yang lebih banyak berprofesi sebagai petani lebih cenderung memilih Partai Persatuan Pembangunan dengan alasan ideologis. Sedangkan LDII yang saat itu bernama LEMKARI, oleh karena lembaga ini dibidani tokoh orde baru dipandang sebagai lembaga underbow golkar. Namun demikian saat itu tidak sampai terjadi perseteruan yang mengarah kepada kekerasan fisik, hanya saja cukup menghangatkan suasana terutama menjelang PEMILU.

Pandangan-pandangan agama saat itu lebih cenderung digunakan sebagai legitimasi pilihan-pilihan politik. Hal ini menyebabkan penilaian pandangan keagamaan yang berbeda tidak lagi murni persoalan agama, namun selalu bernuansa politik. Saat Orde Baru tumbang, masyarakat Desa Awar-Awar seolah lepas dari tekanan politik yang mengharuskan menjatuhkan pilihannya pada salah satu partai. Reformasi merupakan momentum kembalinya harmoni di masyarakat dan pilihan politik diposisikan sebagai hak tiap-tiap warga yang tidak boleh diintervensi apalagi dengan paksaan dan kekerasan. Saat ini warga lebih melihat perhelatan politik sebagai sebuah permai-

nan, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidaklah penting tetapi menjaga harmoni adalah pilihan.

Apa yang membedakan setiap upaya dialog yang dilakukan oleh masing-masing ormas keagamaan, saat ini adalah tidak ada lagi kecurigaan kepentingan politik praktis. Masing-masing warga bebas mengekspresikan keyakinan keagamaannya dalam kultur masyarakat setempat tanpa kecurigaan sehingga yang berbeda pandangan dapat menerima sebagai sebuah keniscayaan yang bukan persolan fundamental dari agama. Perbedaan hanya pada perbedaan aksentuasi, orientasi dan pendekatan. Warga Desa Awar-Awar lebih melihat perbedaan NU, MD dan LDII sebagai sebuah pilihan menjalankan ibadah dengan tenang. Untuk bermu'amalah (relasi sosial), diserahkan kepada pribadi masing-masing dan integritas pada budaya harmoni adalah kuncinya.

Harmoni sebagai Rahmat Kehidupan

Sebagaimana dipahami, harmoni adalah kondisi hubungan antar warga yang intim walaupun ada perbedaan-perbedaan. Sebuah kehidupan sosial diandaikan dalam perspektif Èmile Durkheim (1858-1917) akan terbangun karena adanya solidaritas sosial yang merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Solidaritas berdasarkan hasilnya menurut Durkheim, dapat dibedakan antara solidaritas positif dan solidaritas negatif. Solidaritas negatif tidak menghasilkan integrasi apapun, dan dengan demikian tidak memiliki kekhususan, sedangkan solidaritas positif dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri: *pertama*, yang satu mengikat individu pada masyarakat secara langsung, tanpa perantara. Pada solidaritas positif yang lainnya, individu tergantung dari masyarakat, karena individu tergantung dari bagian-bagian yang membentuk masyarakat tersebut, *kedua*: solidaritas positif yang kedua adalah suatu sistem

fungsi-fungsi yang berbeda dan khusus, yang menyatukan hubungan-hubungan yang tetap, walaupun sebenarnya kedua masyarakat tersebut hanyalah satu saja. Keduanya hanya merupakan dua wajah dari satu kenyataan yang sama, namun perlu dibedakan, *ketiga*: dari perbedaan yang kedua itu muncul perbedaan yang ketiga, yang akan memberi ciri dan nama kepada kedua solidaritas itu. Ciri-ciri tipe kolektif tersebut adalah individu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, tetapi berbeda peranan dan fungsinya dalam masyarakat, namun masih tetap dalam satu kesatuan.

Selanjutnya pandangan Durkheim mengenai masyarakat adalah sesuatu yang hidup, masyarakat berpikir dan bertindak laku dihadapkan kepada gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar individu. Fakta sosial yang berada di luar individu memiliki kekuatan untuk memaksa. Pada awalnya, fakta sosial berasal dari pikiran atau tingkah laku individu, namun terdapat pula pikiran dan tingkah laku yang sama dari individu-individu yang lain, sehingga menjadi tingkah laku dan pikiran masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fakta sosial. Fakta sosial yang merupakan gejala umum ini sifatnya kolektif, disebabkan oleh sesuatu yang dipaksakan pada tiap-tiap individu.

Harmoni sebagai salah satu bentuk solidaritas sudah pasti akan sangat menentukan kehidupan masyarakat secara ekonomi, sosial-budaya dan politik. Secara ekonomi kondisi harmoni diantara warga yang memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda akan memberikan kesempatan untuk melakukan usaha-usaha ekonomi tanpa terhalangi oleh sentimen-sentimen subjektif keagamaan. Secara sosial budaya pengaruhnya nampak pada semakin integratifnya setiap hubungan diantara warga. Kesadaran saling membantu, baik pikiran maupun harta benda masih sangat terasa di Desa Awar-awar. Sebuah acara hajatan di sebuah keluarga direpson oleh warga yang lainnya seolah hal tersebut hajatan bagi seluruh desa minimal di sekitar lingkungan yang memiliki hajatan. Sehingga ketidaksiuksesan sebuah acara hajatan akan menjadi aib bagi seluruh warga, karenanya upaya membantu mensukseskan acara tersebut merupakan suatu kewajiban.

Kebersamaan yang harmonis juga nampak pada acara-acara yang khas komunitas tertentu, seperti “tahlilan” yang khas dari warga NU, selalu juga diikuti dengan tertib tanpa interupsi dari warga yang lain. Demikian pula se-

baliknya, tidak adanya tahlilan saat ada kematian salah satu anggota keluarga tidak dipandang sebagai sebuah kesalahan oleh kelompok yang lainnya.

Demikian pula soal pilihan politik, dalam sebuah *taniyan lanjeng* bisa ada dua atau tiga bendera partai yang dipasang di depan rumah. Pilihan politik lebih dipandang sebagai keberagaman cara, bukan visi perjuangan. Kalaupun ada “*persemonan*” selalu dilakukan dalam kerangka berkelakar atau bahasa setempat “*agejek*”. Misalnya si A yang diketahui sebagai tim sukses partai tertentu akan sering ditanya oleh warga yang lain :”*berempa mbokna oleh pese ?*” (berapa kamu dapat uang?) yang diakhiri dengan tertawa bersama.

Walhasil, dengan kehidupan keagamaan yang harmoni, kehidupan ekonomi, sosial-budaya dan politik menjadi nampak indah dan berjalan positif semakin mendewasakan cara hidup masing-masing warga. Harmoni adalah rahmat bagi kehidupan warga.

Penutup

Harmoni dimanapun bisa diciptakan, karena harmoni bukanlah sesuatu yang berisifat terberi (*given*), namun merupakan produk ikhtiar warga masyarakat atau dalam istilah Gidden sebagai sebuah proyek identitas. Harmoni dalam kultur *pendalungan* merupakan sebuah model konstruksi sosial melalui kehidupan sehari-hari. Harmoni diantara warga NU, MD dan LDII di Desa Awar-awar Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo didorong oleh terutama pemahaman keagamaan warga tentang perbedaan-perbedaan praktik keagamaan. Pemahaman keagamaan warga terbentuk melalui proses sosialisasi yang dialektik antar berbagai komponen masyarakat, baik warga maupun elit. Perspektif elit tentang ajaran yang diyakini sangat memiliki pengaruh terhadap pemahaman warga. Pengaruh elit dan kemungkinan penerimaan warga secara personal akan ide-ide keagamaan yang cenderung toleran dimungkinkan karena didukung oleh kultur *pendalungan* yang memiliki karakteristik terbuka, akomodatif, spontan, memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat dan pathernalistik.

Kultur *pendalungan* adalah kultur campuran antara Jawa dan Madura. Budaya campuran hasil hibridisasi yang bersifat multikultural merupakan budaya yang terus berproses. Karenanya bentuk ini rapuh dan selalu mengalami perubahan. Kultur *pendalungan* ibarat pelangi yang sangat dipengaruhi

oleh spektrum warna yang membentuknya. Spektrum warna pelangi senantiasa mencerminkan harmoni keindahan. Sebagai budaya hybrid yang multi-kultural, budaya pendalungan merupakan masa depan masyarakat majemuk secara keseluruhan. Harmoni nampak lebih dimungkinkan pengupayaannya dalam konteks budaya hybrid seperti halnya warga DesaAwar-awar Asembagus Kabupaten Situbondo.

Harmoni dalam perbedaan yang terjadi diantara warga NU, MD, dan LDII dengan kultur *hybrid* yang multikultural dikonstruksi secara sosial dalam tiga momen *eksternalisasi* yaitu pemahaman ajaran agama melalui ormas, momen *objektivasi* terjadi saat interaksi antar warga melalui lembaga sosial dan momen *internalisasi* yaitu identifikasi diri melalui sosialisasi. Harmoni dalam kehidupan keagamaan ini pada akhirnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan warga baik ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Assyaukani, Luthfi. "Fatwa and Violence in Indonesia". *Journal of Religion and Society* (Volume 11. 1999).
- Berger, Peter, L and Luckman, T, *The Social Construction of Reality* (Garden City: Doubleday, 1966).
- Berger, Peter, L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theori of Religion* (New York. Anchor, 1967).
- Berger, Peter, L. *Revolusi Kapitalis*. ter. Mohamad Oemar (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Castell, Manuel. *The Power of Identity* (Malden: Blackwell Publishing, 2004).
- Cassirer, Ernst. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*. ter. Alois A. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1987).
- Featherstone, Mike. *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity* (London: SAGE Publications, 1990).
- *Consumer Culture and Postmodernism* (London: SAGE Publications, 1991).
- Geertz, Clifford. *Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

- Guba E.G. & Lincoln, Y.S. & *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hill: SAGE Publication Inc, 1985)
- Isfironi, Mohammad. "Pemikiran Keagamaan Kiai di Situbondo: Studi Pendekatan Fiqh dalam Merespon Masalah Sosial Keagamaan". *Tesis S.2* (Malang: UNISMA Malang, Program Pascasarjana, 2002).
- , Agama dan Solidaritas Sosial: Studi terhadap Tradisi Rasulan Masyarakat Gunung Kidul DIY. *Laporan Penelitian* (Yogyakarta: 2009).
- Lincoln, Y.S. dan Denzin, N.K.. "The Seventh Moment: Out of the Past" dalam N.K. Denzin & Y.S Lincoln (ed). *Handbook of Qualitative Research* (London: SAGE Publications, 2000).
- Marshall, Catherine and Rossman, B, Gretchen. *Designing Qualitative Research*. (California: SAGE Publications, 1990).
- Mas'ud, Abd. Rahman. "Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia's Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)", *Jurnal Multikultural & Multireligius HARMONI* (No. 34. Vol. IX, 2010).
- Mulder, Niels. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari orang Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1984).
- Mulyana, S. *Negarakeretagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979).
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)..
- Nawiyanto. "Pertumbuhan Penduduk Besuki: Kajian Demografi Historis". *HUMANIORA* (Vol. 21 No. 2 Juni, 2009).
- Newman, Lawrence, W. *Social Research Methods: Qualitative and Quatitatives Approaches*. 4th. Ed. (Sydney: Allyn and Bacon, 2000).
- Nordholt, Schulte, Henk dan Klinken, van, Gerry. *Politik Lokal di Indonesia*. (Jakarta: Obor, 2007).
- Rahmawan, Jamhari, Ahmad dkk., "Faktor Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Sebagai Solusi Konflik Antar Umat Beragama Di Indonesia" *Laporan Penelitian* (Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, 2008).
- Ritzer, George and Goodman J. Douglas. *Teori Sosiologi*. Ter. Inyak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009).
- Spradley, P, James, *Metode Etnografi*, ter. Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Suseno, SJ., Magnis, Franz. *Religious Harmony in Religious Diversity*. The

- Case of Indonesia. Dalam Wasim, Theria, Alef et.all (ed.) *Religious Harmony: Problems, Practice and Education*. Proceeding of the Regional Conference of the International Association for the History of Religions (Yogyakarta dan Semarang Indonesia: September 27th 2004, 2005).
- Sutarto, Ayu. 2006. "Sekilas tentang Masyarakat Pendalungan" *Makalah Pembekalan Jelajah Budaya 2006*", diselenggarakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tanggal 7-10 Agustus 2006.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LkiS, 2005).
- Anam, Choirul. Dkk. *Fakta dan Kesaksian Tragedi Situbondo* (Jatim: Tim Pencari Fakta GP Anshor Jatim, 1996).
- Wasim, Theria, Alef et.all (ed.) *Religious Harmony: Problems, Practice and Education*. Proceeding of the Regional Conference of the International Association for the History of Religions. Yogyakarta adn Semarang Indonesia. September 27th 2004, 2005).
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978).
- http://www.yadmi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=38%3Aterkini&id=549%3Aatho-mudzhar-sikap-toleran-menjadi-kontribusi-terciptanya-kerukunan&Itemid=69 diunduh pada Kamis, 24 Juni 2010
- <http://ldii.info/sejarah-ldii.html> diunduh pada Kamis, 24 Juni 2010.

